



Pengaruh Tingkat Upah Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kabupaten Merauke

Emanuel Kainakaimu¹⁾, Hendricus Lembang²⁾

Fakultas konomi dan bisnis, universitas musamus

email: emanuel@gmail.com, hendricuslembang@unmu.ac.id

ABSTRAK

Pengaruh Tingkat Upah terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Merauke, dibimbing oleh Hendricus Lembang

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 53 responden pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Merauke. Data diolah dengan menggunakan skala Likert dengan teknik analisa linear sederhana menggunakan SPSS. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel tingkat upah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Hasil analisis regresi menunjukkan nilai coefficient-nya sebesar 0.335 dengan probabilitasnya sebesar 0,328. Hal ini disebabkan karena pendapatan upah TKBM masih di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Papua yakni Rp. 3.240.900,- per bulan pada tahun 2019. Sedangkan upah tertinggi yang diterima adalah Rp. 3.000.000,- Selain itu, Pola konsumsi TKBM masih sebagian besar pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi ada sebagian dari mereka membelanjakan seperti rokok, pinang. Bahkan ada juga sebagian kecil dari mereka yang membelanjakan untuk minuman beralkohol, sebab mereka kekurangan kemampuan mengelola uang mereka.

Kata Kunci: *Tingkat upah, kesejahteraan*

Abstract

Effect of Wage Levels on Welfare of Loading and Unloading Cargo Workers (TKBM) in the Port of Merauke.

The research method used is a type of quantitative research. The data in this study are primary data conducted by distributing questionnaires totaling 53 respondents to TKBM in Merauke Port. Data is processed by using a Likert scale with a simple linear analysis technique using SPSS. The data analysis method used is simple regression analysis.

The results of the study prove that the variable wage level does not effect on the welfare of Loading and Unloading Cargo Workers where the results of the regression analysis shows the coefficient value of 0.335 with a probability of 0.328 greater than 0.05. This is because the TKBM wage income is still below the Papua Regional Minimum Wage (UMR) standard of Rp.3,240,900 per month in 2019. While the highest wage only received is Rp. 3.000.000, -. In addition, the TKBM consumption pattern is still mostly of their income to fulfill basic needs. Even more, some of them used to purchase cigarettes, areca nuts, and some even spend on alcoholic drinks because of the lack of the ability to manage their money.

Keywords: *Wage level, welfare*

Alamat korespondensi:

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Merauke 99600 Indonesia



E-mail: emanuel@gmail.com, hendricuslembang@unmu.ac.id

PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan aset modal yang melekat pada manusia. [1] Tenaga kerja diartikan sebagai kelompok penduduk berusia produktif untuk bekerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja merupakan orang yang bekerja dalam rangka memproduksi barang dan jasa. Tenaga kerja yaitu seluruh penduduk suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. [2] Produksi barang dan jasa ini entah digunakan untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan orang lain. Usia kerja ataupun usia produktif di Indonesia dikategorikan mulai dari usia 15 sampai 64 tahun.

Ketersediaan tenaga kerja (*man power*) merupakan faktor produksi sebagai sumber daya manusia (*human resources*) untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah. Peranan sumber daya manusia dapat dioptimalkan secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan bersama.[3] Sumber daya manusia tersebut baik tenaga kerja, pegawai maupun karyawan menjadi penggerak aktivitas kegiatan ekonomi. Seperti halnya dengan tenaga kerja yang bekerja di Pelabuhan Merauke dalam hal ini Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Posisi TKBM di pelabuhan sangat penting karena semakin banyaknya kapal-kapal nasional yang mulai memadati pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, sehingga sangat membutuhkan pada TKBM yang memiliki keahlian serta kehandalan dalam menggunakan alat-alat bongkar muat di pelabuhan. [4] Walaupun semakin majunya peranan teknologi seperti mesin-mesin modern tentu tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa peran tenaga manusia. Jumlah TKBM di Pelabuhan Merauke menambah besaran penyerapan tenaga kerja. [5] Karena itu pula, peran TKBM di Pelabuhan Merauke sangat penting peranannya. Tenaga kerja seperti TKBM merupakan sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan proses produksi. Merekapun dituntut untuk dapat bekerja maksimal dengan kemampuan yang lebih produktif dan profesional. Namun di dalam kegiatan merekapun tetap memperhatikan keselamatan dengan menciptakan rasa aman dalam melakukan setiap kegiatan mereka. Akan tetapi, kinerja TKBM juga sesuai dengan harapan pengguna jasa. [6] Perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja mereka juga selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang memberikan jaminan keselamatan kerja, keamanan kerja serta berkenaan dengan keberadaan mereka sebagai pekerja dalam menjalankan kegiatan bongkar dan muat di Pelabuhan Merauke.

Pelabuhan memegang peran strategis dan sangat penting dalam distribusi arus barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Aktivitasnya mampu mendorong mobilitasi perdagangan dan industri dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Demikian juga halnya, peranan Pelabuhan Merauke telah berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional. Sebagaimana fungsi pelabuhan menjadi tempat aktivitas membongkar muat barang maupun penumpang untuk berangkat menuju suatu daerah maupun tiba dari daerah lainnya. Aktivitas di pelabuhan akan terlihat ada barang-barang yang akan diangkut dengan kapal menuju daerah lain maupun juga barang akan dibongkar dari kapal lalu dipindahkan ke moda transportasi lain mobil truck. Kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan akan dilaksanakan oleh TKBM. Sehingga TKBM sangat berperan dalam menunjang aktivitas perpindahan barang di Pelabuhan Merauke.

TKBM secara langsung terlibat dalam melakukan kegiatan bongkar muat yang sangat mendorong kelancaran kegiatan proses bongkar muatan barang di pelabuhan. Sehingga, upah tenaga kerja bongkar muat menjadi salah satu komponen yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan TKBM dan keluarganya agar mereka dapat hidup secara layak. Kesejahteraan penduduk berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh. [7]

Upah masih tetap menjadi persoalan utama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di satu sisi pekerja mengharapkan upah yang tinggi namun di sisi pengusaha, pemberian upah yang tinggi akan membebani biaya operasional perusahaan. [8] Oleh sebab itu, upah buruh tetap menyesuaikan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang setiap tahun mengalami kenaikan. UMP ini merupakan standar penggajian minimum yang dibayarkan kepada penerima upah. UMP berdasarkan standar untuk hidup layak yang diukur dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak di suatu daerah yaitu suatu provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagai gambar kondisi perkembangan kenaikan dan patokan standar penggajian Upah Minimum Provinsi Papua dari tahun 2015-2020 dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Papua
tahun 2015-2020

No.	Tahun	UMP (Rp)	Kenaikan (Persen)
1.	2020	3.516.700	8,51
2.	2019	3.240.900	11,92
3.	2018	2.895.650	8,71
4.	2017	2.663.646	9,39
5.	2016	2.435.000	11,04
6.	2015	2.193.000	

Sumber: Surat Keputusan Gubernur Papua, data diolah.

Pemberian upah bagi tenaga kerja selalu mengacu pada UMP setempat yang setiap tahun mengalami peningkatan karena penyesuaian dari aspek tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah agar tenaga kerja dapat hidup secara layak. Pemberian upah merupakan bentuk penghargaan atas hasil yang mereka telah kerjakan. Upah ini adalah balas jasa atas tenaga yang telah dikorbankan bagi pengguna jasa mereka. Upah TKBM merupakan jasa yang setara dengan uang yang dapat menjamin untuk hidup selama satu bulan. Sehingga pada hakikatnya upah menjadi suatu penghargaan atas tenaga ataupun energi dari tenaga kerja yang telah dimanfaatkan dan dibayarkan dalam uang. Kesesuaian pengorbanan dengan penghargaan ini akan berdampak pada semangat dan motivasi bekerja. Apabila mereka merasakan penghargaan tersebut cukup layak maka mereka akan lebih giat bekerja dan lebih produktif untuk mendapatkan imbalan jasa mereka.

Sebab upah yang diwujudkan dalam bentuk uang merupakan pendapatan seseorang. Besar kecilnya pendapatan dapat menjadi salah satu aspek dalam mengukur tingkat kesejahteraan seseorang TKBM yang bekerja pada Pelabuhan Merauke. Berdasarkan hasil ketetapan Pemerintah Provinsi Papua tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 yaitu sebesar Rp 3.240.900,- Standar upah ini merupakan standar untuk hidup secara layak di daerah Provinsi Papua dari hasil upah tersebut. Namun, UMP ini masih sering tidak diterapkan oleh perusahaan pengguna jasa mereka. Sehingga sistem pengupahan berdasarkan UMP dari perusahaan seringkali menjadi ajang keributan oleh TKBM. Oleh karena upah tenaga kerja seringkali dibayarkan masih di bawah UMP.

Sistem pengubahan yang masih dianggap tidak adil bagi buruh atau pekerja yang diberikan oleh perusahaan merupakan suatu fakta yang dialami oleh TKBM. Perlakuan yang tidak adil ini merupakan bentuk eksploitasi di dalam suatu sistem kapitalis. Sistem kapitalis dapat melahirkan unsur-unsur destruktif yang tidak peka terhadap keadilan sosial. Sebab ada pelaku tunggal yaitu perusahaan besar dalam mengontrol pasar. Perusahaan ini mampu menguasai dan mengontrol pasar karena memiliki modal besar. Sehingga perusahaan tersebut secara sepikah melakukan eksploitasi atas nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja dengan menguntungkan perusahaan atau pemilik modal dengan meminimalisasi biaya upah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis pendekatan kuantitatif ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Jumlah populasi adalah karyawan TKBM yang masih aktif bekerja di Pelabuhan Merauke sebanyak 136 karyawan pada tahun 2019. Pada penelitian ini, penarikan sampel dapat dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N \cdot e^2)}$$

Di mana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{136}{1+136(0,01^2)}$$

$$n = \frac{136}{(2,36)} = 52,63$$

52,63 dibulatkan menjadi 53 sehingga:

n = 53 sampel

Sehingga penelitian menggunakan sampel sebanyak 53 respon. Di dalam penelitian ini sumber data yang dilakukan melalui teknik penarikan sampel yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Indikator kesejahteraan yang terdiri atas beberapa sub indikator dengan menggunakan Skala Likert untuk mengukurnya seperti di bawah ini:

Tabel 2

Pengukuran Skala Likert

No.	Angka	Ukuran
1.	5	Sangat Tinggi
2.	4	Tinggi
3.	3	Sedang
4.	2	Rendah
5.	1	Sangat Rendah

Sedangkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

- Tingkat upah yaitu (*wage rate*) yaitu jumlah upah yang dibayarkan berdasarkan satuan ukuran kerja yang diukur dengan upah per bulan dihitung dalam rupiah.
- Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Dalam ekonomi, dihubungkan dengan keuntungan benda. Untuk mengukur kesejahteraan dengan menggunakan indikator yaitu status kepemilikan tempat tinggal, tingkat pendidikan, tabungan, asuransi dan makan makanan bergizi dalam sehari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Karakteristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

- Responden Berdasarkan Umur

Tabel 3

Responden Berdasarkan Umur

No.	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1.	15-20	2	3,77
2.	21-30	33	62,26
3.	31-40	15	28,30
4.	41-50	3	5,66
5.	51-64	0	0
Jumlah		53	100

Sumber Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa responden tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Kabupaten Merauke masuk di dalam usia produktif dari 16 sampai dengan 64 tahun. Kelompok umur yang paling banyak bekerja sebagai TKBM yaitu usia antara 21 sampai dengan 30 tahun sebanyak 33 orang atau 62,26 persen. Kemudian disusul kelompok umur antara 31-40 tahun sebanyak 15 orang atau 28,30 persen. Sisanya adalah kelompok umur antara 41-50 tahun atau 5,66 persen dan kelompok umur antara 16-20 tahun sebanyak 2 atau 3,77 persen. Kelompok umur produktif antara 51-64 tahun tidak ada responden. Oleh karena TKBM membutuhkan tenaga yang kuat dan lebih cepat. Sehingga TKBM lebih banyak

bekerja pada usia-usia produktif yang masih lebih mudah. Sedangkan TKBM usia antara 51-64 sudah tidak ada karena kondisi fisik mulai menurun untuk melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

2. Responden Berdasarkan Upah

Tabel 4
Responden Berdasarkan Tingkat Upah

No.	Tingkat Upah (Rp)	Skala Likert	Frekuensi	
			Orang	Persentase (%)
1.	≤ 2.499.999,-	1	8	15,09
2.	≥ 2.500.000 dan ≤ 2.699.999,-	2	19	35,85
3.	≥ 2.700.000 dan ≤ 2.999.999,-	3	4	7,55
4.	≥ 3.000.000,- dan ≤ 3.199.999,-	4	22	41,51
5.	≥ 3.200.000	5	0	0
Jumlah			53	100

Sumber Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa responden tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Kabupaten Merauke tentang tingkat upah. Tingkat upah yang tertinggi diterima oleh TKBM yaitu antara lebih besar atau sama dengan Rp. 3.000.000,- dan lebih kecil atau sama dengan Rp. 3.199.999,- per bulan ada sebanyak 22 orang atau 41,51 persen, Jumlah responden yang menerima upah lebih besar atau sama dengan Rp. 2.700.000,- dan lebih kecil atau sama dengan Rp. 2.999.999,- ada 4 orang responden atau 7,55 persen. Kemudian upah lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000,- dan lebih kecil atau sama dengan Rp. 2.699.999,- ada 19 orang responden atau 35,85 persen. Sedangkan upah di bawah atau sama dengan Rp. 2.499.999,- ada 8 orang atau 15,09 persen. Sedangkan upah di atas Rp. 3.200.000, untuk responden tidak ada.

3. Responden Berdasarkan Status Rumah Tempat Tinggal

Tabel 5
Responden Berdasarkan Status Rumah Tempat Tinggal

No.	Status Rumah Tempat Tinggal	Skala Likert	Frekuensi	
			Orang	Persentase (%)
1.	Tidak Punya Rumah Tinggal	1	0	0
2.	Menumpang	2	0	0
3.	Tidak Layak Huni	3	27	50,94
4.	Sewa	4	0	0
5.	Memiliki Rumah Sendiri Layak Huni	5	26	49,06
Jumlah			53	100

Sumber Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa responden tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Kabupaten Merauke sebagian besar menempati rumah tidak layak huni yaitu ada sebanyak 27 responden atau 50,94 persen. Sedangkan responden yang sudah menempati rumah sendiri layak huni ada sebanyak 26 responden atau 49,06 persen. Dari seluruh jumlah responden yang ditanyakan di dalam kuisioner status kepemilikan rumah tinggal yaitu tidak ada yang menyebutkan tidak punya rumah tinggal, menumpang dan menyewa rumah.

4. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 6
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Skala Likert	Frekuensi	
			Orang	Persentase (%)
1.	Tidak Tamat SD/Tidak pernah sekolah	1	4	7,55
2.	Tamat SD	2	17	32,08
3.	Tamat SMP/SLTP	3	26	49,06

4.	Tamat SMA/SLTA	4	6	11,32
5.	Lulusan D3/Sarjana	5	0	0
Jumlah			53	100

Sumber Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa responden tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Kabupaten Merauke sebagian besar merupakan tamatan SMP/SLTP sebanyak 26 orang atau 49,06 persen. Kemudian disusul tamatan SD sebanyak 17 orang atau 32,08 persen, tamatan SMA/SLTA ada sebanyak 6 orang responden atau 11,32 persen. Sisanya tidak tamat SD/ataupun tidak pernah sekolah sebanyak 4 orang atau 7,55 persen. Tidak ada satupun responden yang dijadikan sampel yang memiliki pendidikan setara dengan Lulusan D3 maupun Sarjana.

5. Responden Berdasarkan Nominal Tabungan Rata-Rata per Bulan

Tabel 7

Responden Berdasarkan Nilai Tabungan Rata-Rata per Bulan

No.	Nominal tabungan (Rp)	Skala Likert	Frekuensi	
			Orang	Persentase (%)
1.	Di bawah 100.000	1	1	1,89
2.	100.001 – 300.000	2	28	52,83
3.	300.001 – 500.000	3	23	43,80
4.	500.001 – 1.000.000	4	1	1,89
5.	Di atas 1.000.000	5	0	0
Jumlah			53	100

Sumber Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa responden tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Kabupaten Merauke sebagian besar memiliki jumlah tabungan setiap bulannya rata-rata antara Rp. 100.001,- sampai dengan Rp. 300.000,- yaitu berjumlah 28 orang atau 52,83 persen. Kemudian jumlah tabungan rata-rata Rp. 300.001,- sampai dengan Rp. 500.000,- yaitu berjumlah 23 orang atau 43,80 persen. Sedangkan jumlah rata-rata tabungan di bawah Rp. 100.000,- per bulan ada 1 orang atau 1,89 persen begitupula tabungan rata-rata Rp. 500.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- hanya 1 orang. Tidak ada TKBM yang memiliki jumlah tabungan di atas Rp. 1.000.000,- per bulan.

6. Responden Berdasarkan Jaminan Sosial

Tabel 8

Responden Berdasarkan Jaminan Sosial

No.	Jaminan Kesehatan	Skala Likert	Frekuensi	
			Orang	Persentase (%)
1.	Tidak memiliki asuransi	1	0	0
2.	Bonus	2	0	0
3.	Uang Transportasi	3	0	0
4.	Memiliki BPJS Kesehatan	4	53	100
5.	Tunjangan Hari Tua	5	0	0
Jumlah			53	100

Sumber Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa seluruh responden tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Kabupaten Merauke memiliki jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan yang telah didaftarkan langsung oleh perusahaan yaitu BPJS Kesehatan atau 100 persen memiliki keanggotaan yang dijamin oleh asuransi kesehatan (BPJS). Tetapi fasilitas tunjangan hari tua atau uang pensiun bagi TKBM tidak ada. Juga uang transportasi dan bonus juga tidak ada.

7. Responden Berdasarkan Makanan Bergizi

Tabel 9

Responden Berdasarkan Makanan Bergizi

No.	Kategori	Skala Likert	Frekuensi	
			Orang	Persentase (%)
1.	Makan 1 kali sehari	1	0	0

2. Makan 2 kali sehari tanpa lauk pauk	2	0	0
3. Makan 2 kali sehari dengan lauk pauk	3	0	0
4. Makan 3 kali sehari tanpa lauk pauk	4	0	0
5. Makan 3 kali sehari dengan lauk pauk	5	53	100
Jumlah		53	100

Sumber Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel 9 di atas menunjukkan bahwa seluruh responden tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Kabupaten Merauke dapat makan makanan yang bergizi atau 100 persen. Sedangkan berdasarkan data pada Tabel 10 metode analisis regresi linear sederhana dan diolah menggunakan SPSS maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut ;

Tabel 10

**Estimasi Pengaruh Tingkat Upah terhadap Kesejahteraan TKBM
di Pelabuhan Merauke**

Variabel	Koefisien Regresi	t-Hitung	F-Hitung	Signifikansi
Belanja (Tingkat Upah) Modal	0,335	0,987	0,975	0,328
Konstanta	6,536			0.000
Adjusted R Square	0.019			

Sumber : Data Hasil Olahan, 2020

Keterangan : Nilai signifikansi pada tingkat 5% atau 0,05

Berdasarkan data pada tabel 10 di atas dapat diperoleh rumus regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 6,536 + 0,335 + e$$

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa variabel tingkat upah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Merauke. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai *coefficient*-nya sebesar 0,335 dengan probabilitasnya sebesar 0,328 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 5%.

Hal ini disebabkan karena pendapatan upah TKBM masih di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Papua yakni Rp. 3.240.900,- per bulan pada tahun 2019. UMR merupakan standar penggajian terendah untuk bisa hidup layak setiap bulannya. Sedangkan upah tertinggi TKBM yang diterima adalah Rp. 3.000.000,-. Tingkat pendidikan TKBM yang rendah yaitu sebagian besar tamatan SMP/SLTP sebanyak 26 orang atau 49,06 persen dan tamatan SD sebanyak 17 orang atau 32,08 persen. Kemudian tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Kabupaten Merauke sebagian besar menempati rumah tidak layak huni yaitu ada sebanyak 27 responden atau 50,94 persen.

Selain itu, pola konsumsi TKBM dalam membelanjakan pendapatannya setiap bulannya rata-rata sebagian besar dari pendapatannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar terutama sembilan bahan pokok seperti beras, teh/kopi, gula, garam sayur, minyak goreng, dan sebagainya. Sedangkan pemenuhan kebutuhan untuk membiayai pendidikan anak, pembelian pakaian dan renovasi rumah tempat tinggal sangat terbatas bahkan sama sekali tidak cukup. Banyak juga disebabkan karena sebagian pendapatan TKBM telah habis digunakan untuk membelian rokok, pinang yang dipinjam dari koperasi pelabuhan. Kewajiban pinjamannya atas pengambilan barang-barang di koperasi, langsung dipotong dari gaji setiap bulannya. Ada dari mereka yang belum dikelola secara baik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap bulan. Bahkan ada sebagian kecil TKBM yang pendapatan sebagian untuk dibelanjakan seperti minuman beralkohol.

Sehingga, pendapatan TKBM masih cukup rendah untuk menunjang kehidupan yang lebih sejahtera. Kondisi Upah TKBM masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Papua yaitu Rp. 3.240.900,- per bulan, pada tahun 2019. Akan tetapi ada

Pendapatan TKBM dapat bertambah apabila ada kapal-kapal muatan yang cukup banyak masuk sehingga TKBM dapat memperoleh tambahan penghasilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat upah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Merauke. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai *coefficient*-nya sebesar 0.335 dengan probabilitasnya sebesar 0,328 lebih besar dari 0,05. Hal ini sebabkan karena pendapatan mereka setiap bulannya masih di bawah dari standar upah minimum regional (UMR) Provinsi Papua. Rp. 3.240.900,- per bulan pada tahun 2019. Juga pendapatan mereka setiap bulannya belum dikelola dengan baik, sehingga pendapatannya hanya sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan ada yang pendapatannya digunakan untuk konsumsi rokok, pinang serta malahan ada yang membelanjakan untuk konsumsi minuman beralkohol.

Saran

1. Perlu memperhatiak sistem pengupahan TKBM untuk disesuaikan dengan standar hidup layak UMR yang berlaku saat itu.
2. Perlu ada pelatihan dan pembinaan dari berbagai pihak khususnya instansi untuk menumbuhkan etos kerja dan disiplin. Sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan kompetensi mereka guna meningkatkan pendapatan mereka.
3. Perlu adanya pemberdayaan kemampuan pengelolaan keuangan bagi TKBM agar mereka dapat mengelola pendapatan setiap bulannya dan dapat menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhyiddin, Nurlina Tarmizi, Bambang Bemby Soebyakto, Fauziah Asyiek, Aing Kesuma Putri, Idham Colid dan Liliana, 2021. Mpdal Manusia, Sosial, Upah dan Kesejahteraan: Kasus Pekerja Usaha Kecil dan Menengah, Society, 9 (2) 650-668, 2021, P-ISSN: 2338-6932, E-ISSN: 2597-4874
- [2] Hendra, Rioko dan Yuliana, 2022. Analisis Upah Minimum Regional (UMR) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh Tahun 1984-2018, Prosiding Semdi Unaya, Vol 5 No. 1
- [3] Efendi, Rusalan, Junita Lubis, Elvina, 2020. Pengaruh Upah dan Insentif Karyawan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Milano Panai Tengah, Jurnal Ecobisma, Vol. 7 No. 2 Tahun 2020, p-ISSN; 2477-6092 E-ISSN; 2620-3391.
- [4] Sukmawati, Eka, Johanes O. W. Hitalessy, Ahmad Hidayat, Muchlis Imanullah Arief, 2021. Revitalisasi Kompetensi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Cirebon, Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, Vol 7 No. 3 September 2021, ISSN 2407-635X
- [5] Prayudi, Benny, Ida Budiarty, Irma Febriana MK, 2019. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Batu Bata di Kecamatan seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Jurnal Ekonomi Pempanganun Vol 8, No2 Juli 2019, ISSN: 2302-9595.
- [6] Krisnawati, Siti, Sugandi, Gena Bijaksana, 2019. Upaya Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja Bongkar Muuat di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik (JMBTL) Vol. 5 No. 2 Januari 2019. ISSN 2407-635X.
- [7] Mahendra, Kadek Bagus Siwa Nata, Sudarsana Arka, 2019. Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat, E-Jurnal EP Unud, Vol 10 No. 1 : ISSN 2303-017.
- [8] Utami, Penny Naluria, 2019. Penetapan Upah Minimum dalam Meningkatkan Kesejahteraan bagi Pekerja, Sosio Informa Vol. 5 No. 02, Mei-Agustus Tahun 2019.